

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI, IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

*THE EFFECT OF COMPETENCY, IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD AND ACCOUNTING
SYSTEM ON FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY WITH
FINANCIAL REPORT AS MODERATING VARIABLE*

**SAYIDAH MARYAM SINOSI
A062212012**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI, IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

***THE EFFECT OF COMPETENCY, IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD AND ACCOUNTING
SYSTEM ON FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY WITH
FINANCIAL REPORT AS MODERATING VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**SAYIDAH MARYAM SINOSI
A062212012**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH KOMPETENSI, IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

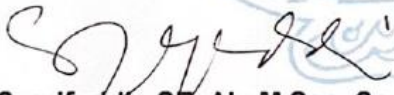
SAYIDAH MARYAM SINOSI
A062212012


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 24 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.
NIP. 196302101990021001


Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196604051992032003

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi


Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sayidah Maryam Sinosi

Nim : A062212012

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH KOMPETENSI, IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Sayidah Maryam Sinosi

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi”**.

Penulis sangat menyadari dan bersyukur telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah mengeluarkan pikiran, waktu, dan gagasannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin., SE., Ak., M.Soc., Sc, CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Kusumawati., SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini mulai dari pemilihan judul.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, SE., AK., M.Si., CA, Bapak Dr. Amiruddin SE., AK., M.Si, Ibu Darmawati, SE., AK., M.Si selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal hingga bisa sampai ketitik penyelesaian tesis ini.
5. Kepada pimpinan SKPD Kabupaten Soppeng dan para staff pada SKPD tempat peneliti melakukan penelitian telah memberikan kesempatan dan menerima penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepada Orangtua saya Bapak Sinosi, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Emmi, S.Pd. yang telah memberikan doa restu dan kasih sayang serta dukungan

semangatnya yang selama ini telah mendidik, membesarkan, dan mendampingi penulis.

7. Kepada teman-teman seperjuangan magister akuntansi Angkatan 2021/2, terkhusus MAKSI Regular A “OBLIGATION 2021/2” atas bantuan, dukungan dan kebersamaan selama proses perkuliahan sampai pada akhir studi.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan tesis ini.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 Juli 2023

Sayidah Maryam Sinosi

ABSTRAK

SAYIDAH MARYAM SINOSI. Pengaruh Kompetensi, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (dibimbing oleh Syarifuddin dan Andi Kusumawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Populasi yang digunakan yaitu pegawai keuangan pada 26 Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dengan jumlah sampel sebanyak 108 pegawai bagian keuangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan memperkuat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan memperkuat pengaruh sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kata kunci: kompetensi, standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan.



ABSTRACT

SAYIDAH MARYAM SINOSI. *The Effect of Competency, Implementation of Government Accounting Standard, and Accounting System on the Financial Management Accountability with Financial Report Quality as a Moderating Variable* (supervised by Syarifuddin and Andi Kusumawati).

This study aims to analyze the effect of competence, implementation of government accounting standards, and financial accounting systems on the financial management accountability with the financial report quality as the moderating variable. This was the quantitative research using saturated sample. The populations used were financial employees at 26 local government work units in Soppeng Regency with the samples of 108 employees. Data were analysed using the multiple regression analysis and moderation regression analysis. The results of the study show that the competency has the positive effect on financial management accountability, the accounting standard implementation has the positive effect on financial management accountability, the financial accounting system has the positive effect on financial management accountability, the financial report quality strengthens the effect of competency on the financial management accountability, the financial report quality strengthens the effect of implementing the government accounting standard on the financial management accountability, the financial report quality strengthens the effect of the financial accounting system on the financial management accountability.

Key words: competency, government accounting standard, accounting system, accountability, financial report quality.



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Teoretis	12
1.4.2 Kegunaan Praktis	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori dan Konsep	16
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	16
2.1.2 <i>Agency Theory</i> (Teori Agensi)	17
2.1.3 Kompetensi	19
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah	23
2.1.5 Sistem Akuntansi.....	30
2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	32
2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan	34
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	37
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	42
3.1 Kerangka Pemikiran	42
3.2 Hipotesis	46
3.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	46

3.2.2 Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	48
3.2.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	49
3.2.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi	51
3.2.5 Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi	52
3.2.6 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi....	54
BAB IV METODE PENELITIAN	56
4.1 Rancangan Penelitian	56
4.2 Situs dan Waktu Penelitian	56
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	57
4.4 Jenis dan Sumber data	59
4.5 Metode Pengumpulan Data	59
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	59
4.7 Instrumen Penelitian	62
4.8 Teknik Analisis Data	63
4.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	63
4.8.2 Uji Kualitas Data	63
4.8.3 Uji Asumsi Klasik	64
4.8.4 Pengajuan Hipotesis	65
BAB V HASIL PENELITIAN.....	67
5.1 Deskripsi Data.....	67
5.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
5.1.2 Deskriptif Karakteristik Responden	68
5.1.3 Deskriptif Karakteristik Variabel	70
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	77
5.2.1 Uji Kualitas Data.....	77
5.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	79
5.2.3 Pengujian Hipotesis	82
BAB VI PEMBAHASAN	93
6.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	94
6.2 Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	97

6.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	99
6.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi.....	101
6.5 Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi	103
6.6 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi	106
BAB VII PENUTUP	109
7.1 Kesimpulan	109
7.2 Implikasi.....	110
7.3 Keterbatasan Penelitian	111
7.4 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Pegawai SKPD Kabupaten Soppeng	56
4.2 Bobot Skala Likert	63
5.1 Pengumpulan Data.....	68
5.2 Deskriptif Responden.....	69
5.3 Hasil Statistik Deskriptif.....	70
5.4 Deskriptif Kompetensi	72
5.5 Deskriptif Standar Akuntansi Pemerintah.....	73
5.6 Deskriptif Sistem Akuntansi	74
5.7 Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	75
5.8 Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan	76
5.9 Hasil Uji Validitas.....	77
5.10 Hasil Uji Realibilitas.....	79
5.11 Uji Normalitas	80
5.12 Uji Multikolinearitas	81
5.13 Hasil Uji R ²	83
5.14 Hasil Uji F	83
5.15 Hasil Uji T	84
5.16 Hasil Uji R ² MRA	87
5.17 Hasil Uji F MRA	88
5.18 Hasil Uji t (t Test) MRA.....	88
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Hasil Pemeriksaan BPK	8
3.1	Kerangka Berpikir	45
3.2	Kerangka Konseptual	46
5.1	Uji Heterokedastisitas.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Kuesioner Penelitian	122
2	Peta Teori	128
3	Statistik Deskriptif.....	134
4	Uji Asumsi Klasik.....	134
5	Analisis Regresi Berganda.....	136
6	Moderated Regression Analysis (MRA)	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas demi membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan masyarakat semakin meningkat dalam rangka melaksanakan tata kelola yang baik (*good governance*) terhadap pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, pemerintah harus melakukan upaya agar dapat meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Informasi yang terdapat pada pelaporan keuangan banyak dipergunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sehingga informasi yang telah didapatkan dalam laporan keuangan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan agar memperoleh pemerintahan yang *good governance*.

Salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat pengelola maupun pengguna anggaran secara terbuka dan dapat dinilai oleh publik (*accountabilities public*). Leviany *et.al.* (2020) menyebutkan bahwa keuangan daerah termasuk seluruh hak serta kewajiban satu daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bisa dilihat dari segi moneter, termasuk segala bentuk kekayaan yang sesuai hak serta kewajiban daerah. Kualitas laporan keuangan yakni penilaian baik atau tidaknya satu laporan yang dipengaruhi beberapa faktor, baik itu sisi input maupun proses. Laporan keuangan

yang diselenggarakan oleh penyusun laporan keuangan wajib kompeten dan melalui tahapan-tahapan yang baik akan memperoleh laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Apabila semua aspek pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, maka muncul pertanggungjawaban yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perekonomian daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar pemerintah memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* diperlukan laporan keuangan yang berkualitas tinggi untuk menjaga efisiensi ekonomi dan tumbuh secara berkelanjutan. Sangat penting bahwa semua perusahaan baik sektor swasta maupun publik menjaga akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam hal pelaporan keuangan. Semua fungsi pelaporan keuangan termasuk preskriptif yang wajib diterapkan dalam satu sistem informasi akuntansi untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Laporan informasi keuangan ini yakni sebuah perusahaan yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan untuk periode akuntansi.

Agar bisa memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, kinerja dalam SKPD wajib dikembangkan. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk bisa diketahui dalam suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik maka pemerintah diharuskan untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rahman dan Permatasari, 2021). Dengan konstelasi yang demikian, semua organisasi dituntut untuk punya daya saing agar bisa bertahan dalam persaingan global. Secara garis besar, kompetensi bisa diperkuat dengan adanya

kemampuan organisasi serta sumber daya yang dimiliki. Melaksanakan perubahan pada organisasi dan SDM termasuk strategi agar organisasi bisa beryajan dan beradaptasi dengan lingkungannya agar sustainable (Sudarmanto, 2020).

Pada dasarnya laporan keuangan yang dihasil dari satu prosedur akuntansi dipergunakan sebagai alat dalam menyalurkan informasi data keuangan dan aktivitas perusahaan kepada *stakeholder*. Singkatnya, laporan keuangan bertujuan sebagai alat informasi penghubung perusahaan dengan para pemangku kepentingan dan menerangkan posisi keuangan perusahaan serta kinerja perusahaannya. Dalam hal ini membutuhkan kompetensi pegawai untuk laporan keuangan diperoleh untuk memenuhi identitas kualitatif laporan keuangan. Menyebabkan laporan keuangan yang diperoleh akan berkualitas tinggi sehingga membantu untuk pengambilan keputusan.

Salah satu aspek terpenting dalam mencapai atau tidaknya satu organisasi mencapai tujuannya, baik publik maupun swasta, yakni kualitas sumber daya manusianya (Sudarmanto, 2020). Sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam organisasi untuk mewujudkan visi serta misi yang sudah punya ketetapan sebab SDM punya kemampuan untuk menyediakan laporan keuangan yang andal. Tidak hanya dipengaruhi oleh SDM melainkan kapasitas SDM untuk memberi hasil guna menciptakan SDM yang baik dibutuhkan pengalaman sebuah kompetensi, dimana kompetensi ini bisa dikatakan sebagai karakteristik dasar sebab kompetensi memegang fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian perusahaan/instansi yang berkesinambungan.

Kompetensi merupakan jenis-jenis perilaku individual yang mempunyai hubungan dengan kriteria referensi efektif serta kinerja yang unggul pada pekerjaan maupun situasi (Sudarmanto, 2020:46). Kompetensi sebagai dasar dari seseorang agar terwujudnya prestasi yang berkualitas untuk penyelesaian kerjanya. SDM yang tidak kompeten, tidak bisa melakukan penyelesaian dalam pekerjaannya dengan ekonomis, efisien serta efektif. Untuk hal ini, suatu pekerjaan bisa dihasilkannya itu hanya membuang-buang waktu dan energi. Dengan adanya kompetensi pegawai, waktu untuk menyiapkan laporan keuangan akan lebih efisien sebab pegawai punya pengetahuan dan pemahaman terkait apa yang diperlu dilakukan sehingga bisa melengkapi dan menyediakan laporan keuangan yang benar dan baik.

Dalam tahap menyusun laporan keuangan diinginkan wajib berdasar standar yang sudah diterapkan. Informasi tersebut terdapat pada laporan keuangan pemerintahan wajib memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan Erlina *et,al.* (2020) dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Pemerintahan, paragraph 35-40 mengatakan bahwasanya “Karakteristik kualitatif laporan keuangan termasuk ukuran-ukuran normative yang dibutuhkan agar diwujudkan dalam informasi akuntansi, agar mencapai tujuan”. Kriteria dalam karakteristik kualitatif mencakup relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengatakan “Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan basis akrual dan basis kas. Basis akrual mencakup pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas sedangkan basis kas mencakup pendapatan LRA dan belanja”. Prinsip-prinsip yang digariskan oleh SAP wajib diikuti bila laporan keuangan memenuhi standar kualitas. Untuk

menentukan apakah laporan keuangan pada pemerintah daerah saat ini sudah disusun sesuai SAP, akibatnya wajib didasarkan pada SAP yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (PP No. 71 Tahun 2010).

Penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan sistem akuntansinya. Berlandaskan sistem akuntansi ini bisa menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan teruntuk pada sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam penerapannya dipakai dalam melaporkan transaksi-transaksi keuangan bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk rangka pelaksanaan APBD agar mengalami peningkatan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dengan melawati tahap penyusunan serta tahap perkembangan yang bisa menunjang efektivitas pengelolaan keuangan melalui standar akuntansi.

Pemerintah daerah diamanatkan oleh Peraturan Kepala Daerah dan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan satu sistem akuntansi yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem ini bisa diatur pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan yang lebih baik bisa dihasilkan berlandaskan ketentuan umum yang sejalan dengan sistem akuntansi keuangan daerah bila sistem akuntansi bisa dipahami secara memadai selama tahap pembuatan laporan keuangan.

Apabila kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dihubungkan pada penggunaan teori stewardship hasilnya akan berkualitas. Secara teori, stewardship berkesinambungan positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Adapun dengan adanya pengendali, pemerintah punya kewajiban dalam membagikan informasi bermanfaat untuk yang memakai informasi keuangan. Pengguna menilai akuntabilitas agar melakukan tindakan seperti

pelaku dan pengambilan keputusan, baik itu dalam aspek sosial, politik dan ekonomi. Erlina *et,al.* (2020) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI mengatakan bahwasanya laporan keuangan bisa dibuat untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengkonsolidasikan laporan keuangan tersebut ke pada laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Daerah.

Pemerintah daerah dibawah tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didasari hak untuk pemungutan pajak serta retribusi daerah, hak untuk mengeluarkan pinjaman, hak untuk mengendalikan kegiatan administrasi daerah dan hak untuk menagih pihak ketiga, hak atas pendapatan daerah dan hak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan daerah. Pengelolaan uang, surat berharga, tagihan, harta kekayaan, dan hak-hak lain yang bisa dinilai dengan memakai uang milik pemerintah daerah dilakukan agar pemerintah daerah bisa melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dan memajukan kepentingan umum (Laporan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Soppeng, 2020).

BPK memberi pendapat tahunan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK terlihat bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah sudah disajikan dan dijelaskan secara jelas dan berkualitas sesuai praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. BPK mengeluarkan satu dari empat opini audit yang berbeda Berlandaskan pemeriksaannya terhadap laporan keuangan pemerintah: "Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar (TW) atau *adversed opinion*, dan pernyataan menolak untuk memberi opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberi Pendapat (TMP)."

Pelaporan di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang menarik agar diteliti lebih dalam. Selain itu juga BPK mengungkapkan bahwa masih banyak temuan-temuan terkait masalah pada laporan keuangan. Seperti LHP LKPP 2020, yang sudah dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai berikut:

“Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman mengatakan, meskipun mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi lembaganya menemukan sejumlah temuan masalah yang bisa merugikan negara. Masalah meliputi 28 persen kelemahan sistem, 29 persen ketidakpatuhan, dan 43 persen ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan” (Kompas TV, Minggu, 27 Juni 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah laporan keuangan pemerintah, termasuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan IHPS Semester I Tahun 2022, tidak menyajikan informasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku umum. Audit BPK mengungkapkan 9.158 temuan, termasuk 15.678 masalah dengan nilai total Rp18,37 triliun. Dari jumlah tersebut, 8.116 (51,8%) terkait dengan isu lemahnya SPI, Rp17,33 triliun terkait dengan isu tidak mengikuti aturan dan peraturan, dan 538 (3,4%) terkait dengan ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan sebesar Rp.1,04 triliun. 8,116 masalah diidentifikasi sebagai masalah ketidakpatuhan, diantaranya sebanyak 5.465 (67,3%) dengan total potensi biaya untuk perusahaan senilai Rp 17,33 triliun, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan sebesar Rp 5,96 triliun dengan kerugian 3.471 (atau 63,5%).
2. Permasalahan sebesar Rp 13,96 triliun dengan potensi kerugian sebanyak 764 (14,0%).
3. Rp 10,49 triliun, atau 1.231 (22,5%) masalah, bisa dikaitkan dengan kurangnya pendapatan.

Akibat dari 2.651 (atau 32,7%) kasus ketidakpatuhan, terjadi penyimpangan administratif. Dari 538 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,04 triliun, terdapat 53 (9,9%) permasalahan ketidakhematan sebesar 787,90 miliar, 7 (1,3%) permasalahan ketidakefisienan dan 478 (88,8%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp257,90 miliar. (sumber: IHPS, 2022/1).



Sumber: BPK RI

Gambar 1.1
Hasil Pemeriksaan BPK

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu yang mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Periksa Keuangan (BPK). Opini ini sudah didapatkan delapan kali berturut-turut diterima Pemda Kabupaten Soppeng, sejak tahun 2014 sampai tahun 2021. Perolehan opini WTP dari BPK karena Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pelaporan keuangannya sudah sesuai standar akuntansi yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari hasil pencapaian yang diperoleh dari Opini WTP oleh BPK, BPK menilai hasil pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya melakukan transparansi keuangan publik yaitu informasi belanja non APBD yang belum disajikan di laporan keuangan tahunan, penyusunan laporan belum sepenuhnya disusun secara memadai untuk unit non APBD.
2. Pemda Soppeng belum sepenuhnya mengelola belanja program dan kegiatan serta Penghapusan Aset yang berkaitan dengan pembangunan manusia.
3. Penetapan strategi fiskal dan penganggaran belum sepenuhnya memadai.
4. Pemda Soppeng belum sepenuhnya melakukan prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran belanja.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, BPK menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan belanja dan daerah dalam program dan kegiatan pembangunan manusia TA 2017 s.d 2019 pada Kabupaten Soppeng belum efektif.

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan/kegagalan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah diukur, pemerintah mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam mengelola keuangan daerah karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Maka dari itu dibutuhkan peran akuntabilitas sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam mengembangkan amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Husna *et,al.* (2022) menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan keuangan serta sistem akuntansi keuangan daerah

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih terstruktur maka diperlukan kompetensi yang ada dan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sistem akuntansi keuangan yang baik. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska (2020) yang mengatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan beberapa aparatur masih kurang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas, sehingga akan berdampak tidak baik terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hilaria (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, SPI dan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hilaria (2019) adalah perbedaan pada lokasi penelitian. Selain itu variabel SPI diganti dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pada penelitian ini adanya penambahan variabel moderasi yaitu kualitas laporan keuangan. Penambahan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dimaksudkan karena dengan adanya kualitas laporan keuangan yang baik akan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Soppeng yang berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum untuk menjaga lebih akuntabel dan transparan dalam hal pelaporan keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi, Implementasi Standar

Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
5. Apakah kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
6. Apakah kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6. Untuk menguji dan menganalisis kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharap bisa berguna sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan terkhusus pada dibidang keuangan mengenai pentingnya kompetensi, implementasi standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan agar bisa meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan yang lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini diantaranya yakni:

1. Bagi akademik

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi lembaga Pendidikan dimana termasuk tempat peneliti belajar dan juga bagi tenaga pendidik lainnya.

2. Bagi instansi

Penelitian ini bisa menjadi sumber dan sebagai bahan evaluasi mengenai pentingnya kompetensi, implementasi SAP, dan sistem akuntansi pada SKPD yang diteleiti sehingga bisa dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan yang lebih baik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti berpendapat bahwa dengan mempersempit ruang lingkup perdebatan menjadi kompetensi, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada setiap SKPD, penelitian akan lebih fokus dan mencegah kesalahan dalam memahami penelitian. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, peneliti mengusulkan, ruang lingkup penelitian ini mengevaluasi pengaruh kompetensi, implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam bab ini memaparkan secara garis besar isi setiap bab, sub bab, dan anak-anak sub bab (Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Hasanuddin, 2013). Dalam penulisan tesis akan meliputi delapan bab, ialah Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual dan Hipotesis, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan dan Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi teori-teori dasar yang berhubungan dengan pembahasan yang ada pada penelitian ini sebagai acuan dalam menganalisis masalah. Bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi dan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka akan menjelaskan landasan teori yang dipakai ialah *Agency Theory* dan *Stewardship Theory* lalu menghubungkan teori tersebut dengan kompetensi, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Kerangka konseptual dan hipotesis akan menjelaskan mengenai bagaimana kerangka konseptual apa yang dipergunakan pada penelitian ini dan pengembangan hipotesis didasari penelitian tesis ini.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bagian metode dari makalah penelitian menjelaskan bagaimana peneliti akan melakukan penyelidikan. Bagian ini menjelaskan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variable penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bagian hasil penelitian menguraikan deskripsi data penelitian, analisis data dan uji hipotesisi. Dalam hasil ini juga peneliti menginterpretasikan proses sekaligus hasil analisis.

BAB VI PEMBAHASAN

Bagian pembahasan dalam penelitian ini untuk menguraikan pembahasan dari hasil pengujian model pengukuran dan temuan dalam penelitian. Temuan ini menguraikan hasil uji statistik dan dikaitkan dengan teori yang didukung bukti empiris penelitian terdahulu.

BAB VII PENUTUP

Bab penutup menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan beserta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan singkat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta merupakan hasil pengujian hipotesis atau penvapaian tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori stewardship sebagai alat analisis bisa dipahami terkait manajemen organisasi. Teori Stewardship menjelaskan motif-motif kerja manajer yang berlandaskan pencapaian tujuan pihak *principal*. Menurut Gunawan (2021) hal ini didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia yang menyatakan manusia pada hakikatnya boleh dipercaya, bertindak secara bertanggung jawab, serta setia serta jujur kepada orang lain.

Teori stewardship bisa dijelaskan sebagai antithesis dari teori agensi berlandaskan kepuasan kepentingan pribadi manajemen itu sendiri. Optimalisasi kinerja untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi dilakukan dengan menerapkan teori stewardship (Astuti, 2019). Manajer sesuai dengan teori kepengurusan melayani kepentingan semua pemangku kepentingan.

Steward percaya bahwa kepentingan bersama dan tindakan yang konsisten dengan pemilik adalah penilaian yang baik jadi bahkan ketika kepentingan mereka bertentangan. Steward berusaha untuk bekerja sama daripada menentang dengan itu dibuat dengan cara yang membantu perusahaan berhasil. Menurut teori kepengurusan, ada korelasi langsung antara kebahagiaan pemegang saham dan kinerja keuangan perusahaan. Penatalayan organisasi bertanggung jawab untuk menjaga dan menumbuhkan kekayaan organisasi melalui efisiensi operasinya untuk meningkatkan utilitasnya. Stewardship

mengandaikan bahwa manajer akan bertindak dengan cara yang menguntungkan pemiliknya.

Pemerintah dalam peran pelayan, mengelola sumber daya, masyarakat sebagai pemilik, dikelola, dan pemerintah dalam peran steward, berkewajiban untuk menyediakan layanan publik dan masyarakat. Teori ini konsisten dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keingintahuan komunal dalam konteks ini yaitu teori stewardship menyiratkan bahwasanya pemerintah daerah yakni lembaga yang bisa dipercaya yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhan warga negara, memberi kontribusi untuk kebaikan bersama dan mendelegasikan tanggung jawab keuangan untuk tujuan ekonomi produktif kapan pun memungkinkan sehingga kebutuhan terpenuhi dan tujuan bersama tercapai (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Hal ini beralasan bahwa kualitas data yang lebih baik bisa dihasilkan bila teori stewardship dikaitkan dengan penyusunan laporan anggaran pemerintah daerah. *Stewardship theory* umumnya dianggap punya efek kausal terhadap kredibilitas laporan anggaran pemerintah. Pemerintah dalam perannya sebagai pengontrol wajib memastikan bahwasanya data keuangannya lengkap dan akurat untuk audiens yang dituju. Pengguna menilai bertanggung jawab atas tindakan mereka dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik untuk diri mereka sendiri.

2.1.2 Agency Theory (Teori Agensi)

Teori stewardship sebagai alat analisis bisa dipahami terkait manajemen organisasi. Teori Stewardship menjelaskan motif-motif kerja manajer yang berlandaskan pencapaian tujuan pihak *principal*. Menurut Gunawan (2021) hal ini didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia yang menyatakan manusia

pada hakikatnya boleh dipercaya, bertindak secara bertanggung jawab, serta setia serta jujur kepada orang lain.

Agency Theory yakni studi akademis tentang peran apa yang dimainkan masing-masing pihak dalam hubungan. *Principal* yakni pemilik atau pemegang saham dan agen yakni manajemen yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. *Agency Theory* dimana teori ini memuat pengertian mengenai hubungan antara pihak *principal* dan pihak agen. Hubungan *principal* dan agen terjadi dimana pemilik (*principal*) yang memberi kepercayaan kepada agen sebab agen punya tanggungjawab penuh atas kepercayaan *principal*.

Akibat potensi konflik yang berkepentingan, pemerintah dan konstituennya mempunyai kepentingan untuk mengakses informasi yang terkandung pada laporan keuangan menjadikan hubungan teori keagenan sebagai konsep penting dalam praktik pelaporan keuangan untuk organisasi sektor publik. Untuk memenuhi perannya sebagai agen, pemerintah wajib memastikan bahwasanya laporan keuangan bersifat informatif bagi mereka yang bisa menggunakannya. Pemerintah mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, dan mereka berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proses pengambilan keputusan di semua bidang masyarakat. Pengguna data keuangan publik dan negara demokrasi bisa dipandang sebagai mitra dalam hubungan keagenan.

Dalam konteks ini, hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini bahwa pemerintah daerah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan sebagai agen yang berwenang bertindak atas nama prinsipal untuk melaksanakan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan bagi pengguna informasi keuangan pemerintah. Pemerintahlah yang berperan dalam kasus ini jika masalah keagenan muncul ketika pelaksanaan cenderung memaksimalkan kepentingan satu sama

lain yang timbul dalam proses anggaran pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku perlu mengevaluasi kebijakan dan kewajiban ditempatkan pada pemerintah mereka sebagai agen dari berbagai perspektif, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Ini menyoroti fakta bahwasanya banyak kelompok akan memengaruhi data yang dipakai pada laporan keuangan pemerintah. Tujuannya yakni untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan akurat dan transparan.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah (Purnamasari dan Handayani, 2015).

Bentuk pengawasan melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan pengungkapan informasi kepada publik. Ada berbagai strategi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dalam penelitian ini laporan keuangan dapat berkualitas apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, adanya penerapan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah, adanya sistem akuntansi yang baik.

2.1.3 Kompetensi

Kapasitas, yang didefinisikan sebagai "kemampuan seseorang, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi dan wewenang untuk mencapai tujuan

mereka secara efektif dan efisien," yakni fondasi yang menjadi dasar kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Kompetensi dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam empat kategori (SANKRI, 2003: 75-76) dalam buku Markipuddin & Karjono (2021).

1. Kompetensi Teknik

Kompetensi Teknik artinya, keterampilan yang diperlukan di bidang yang termasuk sebagian besar tugas pekerjaan untuk perusahaan. Kompetensi teknis yakni kemampuan individu dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan tugasnya, dan definisi ini diberikan oleh PP No. 101/2000 untuk jabatan di pegawai negeri. Pegawai pemerintah yang belum punya keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka wajib mengikuti kursus yang dirancang khusus untuk membantu mereka memperoleh keterampilan tersebut.

2. Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial termasuk keterampilan yang diperlukan untuk manajemen yang efektif dan penyelesaian tujuan bisnis. Kemampuan untuk memakai sumber daya secara efektif serta merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengevaluasi kinerja unit organisasi, semuanya termasuk bagian dari kompetensi manajerial. Demikian pula prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan dan pembangunan.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial termasuk kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam satu organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Secara internal, kompetensi sosial tercermin dalam pengembangan SDM

dengan berbagai institusi yang bertujuan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja di bidang-bidang seperti citra dan kinerja organisasi dalam motivasi.

4. Kompetensi Intelektual/Strategik

Kesuksesan masa depan bisa diukur antara lain dengan kemampuan berpikir strategis individu yang mencakup kemampuan untuk menciptakan visi dan misi yang meyakinkan bagi satu organisasi sebagai bagian pembangunan nasional, serta menciptakan serta berkontribusi saat proses pengambilan keputusan yang baik logis dan sistematis.

Kompetensi bisa diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar individu memperoleh persepsi, pemahaman, kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang berbeda. Bagi masyarakat sangat penting untuk belajar memainkan peran khususnya dalam meningkatkan kemampuan dan juga kebudayaan bagi generasi penerus (Amin, 2011). Dengan adanya kompetensi, kita bisa mengetahui karakteristik tingkat kreativitas yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas. Kompetensi selalu dikaitkan dengan kinerja, dengan punya kinerja yang unggul bisa menentukan optimalitas keberhasilan dalam kinerja.

Pegawai yang kompeten dituntut dalam tugas dan fungsi pokok serta bertanggungjawab terkait apa yang wajib dilaksanakan, dengan memberi pelayanan publik agar bisa melaksanakan pemerintahan yang baik ataupun pemerintahan yang *good governance*. Hal ini perlu disikapi dan sebagai keseimbangan pegawai yang mempunyai kompetensi yang setara dan sesuai tuntutan tugas. Kompetensi pegawai berkaitan dengan kemampuan seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Menurut Spencer pada tahun 1993 dalam buku Sudarmanto (2020), komponen kompetensi meliputi beberapa hal berikut:

1. *Motives*, satu keyakinan atau harapan yang dipegang teguh dengan harapan aktualisasi. Motivasi seseorang yakni apa yang mendorong, membimbing, dan memutuskan tindakan mereka.
2. *Traits* yakni penampilan dan perilaku konstan dalam menanggapi keadaan yang berubah.
3. *Self concept* yakni sikap, nilai, citra diri dalam seseorang.
4. *Knowledge*, bisa diartikan sebagai jumlah total pengalaman dan pelatihan seseorang pada bidang tertentu.
5. *Skill* yakni kemampuan dalam tugas fisik ataupun mental.

Dari komponen-komponen dijelaskan oleh Spencer dalam Sudarmanto (2020), keahlian dan ilmu yang sifatnya bisa terlihat dengan mudah serta berkembang dalam program *training* dan pengembangan SDM, sama halnya dengan citra, watak, serta motif sifatnya tak tampak serta sulit dikembangkan melalui *training* sebab citra, watak, dan motif sudah ada dalam diri seseorang.

Dalam pasal satu keputusan Kepala Kepegawaian Negara No. 43/KEP/2001 mengatakan bahwasanya “kompetensi yakni kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan” (Candratrilaksita, 2022). Adapun indikator kompetensi SDM ialah pada pegawai negeri sipil yakni sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan yang ada dalam diri seseorang dalam pelaksanaan kewajibannya, pegawai membutuhkan pengetahuan baik pengetahuan

umum maupun pengetahuan khusus serta termasuk pengetahuan tentang bidang akuntansi serta sistem akuntansi. Dengan adanya pengetahuan, sangat membantu pegawai dalam penyelesaian tugasnya dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan.

2. Keahlian/Keterampilan

Dengan adanya keahlian dalam bekerja, pegawai bisa menerapkan ide dan pengetahuannya dalam bekerja dengan lebih baik sehingga mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawaban yang diberikan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3. Sikap

Sikap bisa dinilai sebagai reaksi terhadap pekerjaan yang dihasilkan. Sikap pegawai mendukung dalam keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi ialah dengan memperoleh hal yang diinginkan dalam bekerja.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah atau biasa disebut SAP termasuk konsep yang mendasari dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. SAP diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Lingkungan akuntansi pemerintahan sangat memengaruhi karakteristik tujuan akuntansi beserta laporan keuangannya.

1. PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan

Tujuan menyeluruh dari pengaturan penyajian laporan keuangan yakni untuk meningkatkan komparabilitasnya dengan anggaran, antar periode waktu, dan antar entitas yang berbeda. Untuk mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan, bisnis wajib menyusun laporan

keuangan untuk penggunaan umum guna memenuhi kebutuhan sebagian besar pembaca laporan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan semua pertimbangan penyajian yang relevan, pedoman tata letak laporan keuangan, serta persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan. Sebagaimana ditentukan oleh berbagai aturan akuntansi pemerintah, beberapa transaksi dan peristiwa lain wajib diakui, diakui, dievaluasi, dan diungkapkan untuk menyusun laporan keuangan.

Dasar akuntansi laporan keuangan pemerintah atau metode yang dipakai untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran dan aset, kewajiban, dan ekuitas dinilai, sudah ditetapkan.

2. PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tujuan standar LRA membuat dasar untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada pemerintah demi pemenuhan tanggungjawab yang diajukan oleh undang-undang atau peraturan. Laporan pelaksanaan anggaran wajib memberi informasi realisasi dan penganggaran badan pelapor. Agar bisa melihat tingkat pencapaian tujuan dengan membandingkan anggaran dan implementasi antara lembaga legislatif dan eksekutif Berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LRA mencakup pos berikut: pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

3. PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas

Saldo kas dan setara kas pada tanggal neraca, serta sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama periode

akuntansi, semuanya diungkapkan pada laporan arus kas. Akuntabilitas dan pengambilan keputusan berlandaskan informasi yakni dua hal yang dilayani oleh data ini. Setiap periode yang dicakup oleh laporan keuangan entitas pemerintah wajib menyertakan laporan arus kas yang disusun sesuai standar ini yakni satu dari bagian terpenting dari setiap laporan keuangan dan itulah sebabnya pemerintah di semua tingkatan wajib mengikutinya.

Jumlah arus kas masa depan bisa diperkirakan dengan bantuan informasi arus kas, menjadikannya sumber daya yang berharga serta arus kas yang sudah dihasilkan. Laporan arus kas termasuk tanggung jawab unit pelaporan yang bertanggung jawab atas fungsi keuangan umum.

4. PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP No. 4 mengatur penyajian serta pengungkapan yang dibutuhkan dalam CaLK guna peningkatan transparansi laporan keuangan serta penyediaan pemahaman akan informasi keuangan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk membuat laporan keuangan bisa dipahami oleh khalayak luas yang tidak terbatas pada pembaca atau manajer tertentu dari entitas pelapor. Laporan keuangan mungkin berisi informasi yang bisa menyesatkan pembaca. Oleh sebab itu, untuk menghindari keragu-raguan dalam penyajian laporan keuangan memerlukan pengungkapan catatan yang berisi informasi yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman laporan keuangan oleh penerimanya.

Untuk memudahkan pemahaman pembaca atas laporan keuangan, informasi dalam CaLK bisa disajikan dalam bentuk catatan, bagan, daftar dan jadwal, atau bentuk kebiasaan lainnya yang secara singkat meringkas

posisi keuangan dan pelaporan. disajikan dalam setahun berdirinya perusahaan dan kinerjanya.

5. PSAP No. 5 tentang akuntansi persediaan

Akuntansi persediaan diatur oleh prinsip akuntansi persediaan, yang dipakai untuk mengumpulkan data yang relevan untuk dipakai pada laporan keuangan. Semua persediaan wajib disajikan sesuai pernyataan bisnis umum ini kecuali untuk perusahaan negara dan daerah, persyaratan ini berlaku untuk semua tingkat pemerintahan.

6. PSAP No. 6 tentang akuntansi investasi

Laporan ini dimaksudkan menyediakan akuntansi guna investasi serta pengungkapan informasi penting yang wajib diungkapkan pada laporan keuangan. Di sini, "pelaporan keuangan tujuan umum" maksudnya mempersiapkan, mengajukan, menyimpan, dan berinvestasi dalam catatan tersebut. Semua tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah lokal, serta semua lembaga pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi, wajib mematuhi pedoman tersebut. Perusahaan negara bagian dan provinsi tidak termasuk dalam cakupan Pernyataan Standar ini.

Setara kas, usaha patungan, kemitraan aset tetap, dan properti investasi dikecualikan dari ruang lingkup penafian standar ini.

7. PSAP No. 7 tentang akuntansi aset tetap

Tujuan dari standar ini yakni untuk mengubah penilaian, pengakuan, dan penentuan nilai tercatat aset tetap. Namun, persyaratan ini hanya berlaku untuk aset fisik yang terlibat langsung dalam promosi atau pemeliharaan aset fisik lainnya. Tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan infrastruktur.

8. PSAP No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

Entitas yang melakukan proyek konstruksi yang dimaksudkan dipakai pada pengelolaan kegiatan pemerintah dan/atau kota dalam jangka waktu tertentu, wajib memastikan bahwasanya standar tersebut dipatuhi. sebab sifat umumnya jangka panjang dari kegiatan yang dilakukan dalam konstruksi, tanggal mulai satu kegiatan dan tanggal penyelesaian satu kegiatan biasanya dalam periode akuntansi yang berbeda.

9. PSAP No. 9 tentang akuntansi kewajiban

Pengakuan liabilitas, perhitungan nilai tercatat, amortisasi, dan pembebanan beban bunga yakni semua aspek akuntansi liabilitas yang ingin diatur oleh standar ini. Sumber daya ekonomi masa depan akan dikorbankan dimasa depansehingga kewajiban sering timbul dari tanggung jawab sebelumnya atau pemenuhan tugas. Penggunaan otoritas publik, lembaga keuangan, atau sumber kredit pemerintah atau organisasi internasional lainnya menimbulkan tanggung jawab pemerintah.

Tunjangan kompensasi, reparasi, kelebihan pembayaran dari wajib pajak, dan pembagian/retribusi pendapatan kepada usah lain hanyalah beberapa contoh yang wajib dilakukan pemerintah. Hal ini juga bisa terjadi sebagai akibatnya. Setiap anggota masyarakat pelapor mengungkapkan setiap kebutuhan, termasuk jumlah yang diinginkan agar bisa dipenuhi setelah tanggal neraca.

10. PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

Akuntansi untuk pelaporan pada laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan aktivitas yang dihentikan yakni semua hal yang coba diatur dan diperbaiki oleh standar ini. Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, dan CALK semuanya memakai laporan standar ini untuk memperhitungkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan pelaporan operasi yang dihentikan.

Semua organisasi akuntansi, termasuk lembaga layanan publik yang melapor kepada pemerintah pusat/daerah, tunduk pada pernyataan standar ini saat membuat akun keuangan.

11. PSAP No. 11 tentang tentang laporan keuangan konsolidasi

Tujuan dari pernyataan prinsip akuntansi yang berlaku umum ini yakni untuk menyediakan persyaratan yang seragam untuk, dan untuk mempromosikan perbaikan, kualitas dan kelengkapan laporan keuangan konsolidasi yang disiapkan oleh instansi pemerintah untuk dipakai dalam berbagai tujuan pelaporan. Tujuan laporan keuangan tujuan umum, sebagaimana didefinisikan oleh standar ini, yakni untuk melayani kebutuhan konsumen seluas mungkin, termasuk pembuat undang-undang.

12. PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional (LO)

Standar untuk laporan aktivitas pemerintah dimaksudkan untuk memberi lembaga kerangka kerja yang konsisten untuk mengirimkan laporan yang diperlukan sehingga warga negara bisa meminta pertanggungjawaban mereka tentang bagaimana mereka membelanjakan uang pajak mereka. Pelaporan kegiatan operasional dilakukan agar pihak

yang berkepentingan bisa mengetahui lebih dalam sumber pendapatan, beban, dan laba/rugi operasional LO. Demi rasa saling percaya dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan operasi, perubahan permodalan, dan neraca, akibatnya dibuat LO untuk full report dengan siklus pembangkitan (full accrual accounting).

13. PSAP No. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum

Untuk memfasilitasi komparabilitas laporan keuangan yang lebih besar di seluruh anggaran, periode waktu, dan BLU, pernyataan standar ini berupaya mengatur penyajian laporan keuangan untuk BLU. Itu dilakukan dengan meletakkan aturan untuk penyajian laporan keuangan, tata letak laporan keuangan, dan minimal apa yang wajib dimasukkan pada laporan keuangan. Piutang usaha yakni dasar untuk menghasilkan laporan keuangan tahunan.

14. PSAP No. 14 tentang akuntansi aset tak berwujud

Standar akuntansi ini dimaksudkan untuk mengatur bagaimana aset tidak berwujud dicatat pada laporan keuangan. Semua entitas pelapor (termasuk namun tidak terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BLU, dan pemerintah konsolidasi) diwajibkan untuk mematuhi pernyataan standar ini ketika menyusun laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah memakai dasar akrual akuntansi untuk mencatat pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas. Pendapatan dan pengeluaran dicatat saat kas diterima oleh entitas pelapor, sehingga anggaran disusun Berlandaskan kas. Neraca pemerintah disusun Berlandaskan basis akrual yang maksudnya bahwasanya aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat dan dipertanggungjawabkan ketika transaksi atau peristiwa yang memengaruhi

keuangan pemerintah terjadi, bukan ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan.

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan

Peraturan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri Keuangan berlandaskan Sistem Akuntansi Pemerintahan mengatur tentang sistem akuntansi Pemerintahan Daerah. Peraturan Bupati Soppeng No. 36/PERBUP/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yakni regulasi yang mengatur sistem akuntansi pemerintahan daerah dan berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Agar pelaksanaan APBD bisa ditindaklanjuti secepat mungkin, baik secara manual maupun melalui program komputer akibatnya sistem akuntansi pemerintahan daerah termasuk rangkaian proses yang timbul dari proses pendataan, pendokumentasian, penelusuran, dan pelaporan dana. Laporan keuangan pemerintah daerah disiapkan agar memberi Informasi sesuai tentang situasi keuangan semasa periode pelaporan kepada pengguna kepentingan dalam keputusan dan evaluasi alokasi sumber daya. Untuk memahami dan mendapatkan informasi untuk laporan keuangan satu pemerintah daerah dipergunakan untuk melakukan evaluasi tanggung jawab keuangan pemerintah dibutuhkan Catatan dari Laporan keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) bisa menggambaran tentang semua penjelasan termasuk pada laporan keuangan termasuk penjelasan lain yang dibutuhkan untuk melakukannya representasi adil, agar tidak terdapat dalam halaman depan laporan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lembaga publik sangat penting untuk memiliki sistem akuntansi yang dapat secara akurat dan efisien mengidentifikasi

dan menilai keselarasan sistem akuntansi dengan SAP, prosedur pencatatan yang berlaku umum dalam persiapan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu.

Jika tidak memahami sistem akuntansi, dalam hal ini mengakibatkan terhambatnya penyusunan dan persiapan laporan keuangan. Pemerintah mencoba membuat laporan berlandaskan sistem akuntansi keuangan daerah, akibatnya kualitasnya Berlandaskan pada sistem akuntansi keuangan daerah, ada kemungkinan bahwasanya laporan keuangan daerah akan meningkat. (Rahman dan Permatasari, 2021).

Siklus akuntansi keuangan meliputi tahapan-tahapan laporan keuangan sektor publik. Adapun tahapan siklus akuntansi yaitu: 1) transaksi, 2) analisis bukti transaksi, 3) mencatat data transaksi, 4) pengelompokan dan merangkum data yang dicatat, 5) penerbitan laporan dan catatan. Pada tahap awal ialah penetapan transaksi yang mana transaksi dimaksud yakni kesepakatan satu pihak tertentu dengan pihak yang lain. Transaksi bisa dilaporkan pada laporan keuangan. Selanjutnya ialah analisis bukti transaksi dan dengan bukti yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi kemudian dianalisis atas dasar pencatatan. Selanjutnya, pencatatan data transaksi dimana terdapat pencatatan analisis pembuktian transaksi tersebut dicatat untuk transaksi yang sudah berlalu dan dicatat dengan bendahara. Lalu pengelompokkan dalam buku besar, dimana catatan atas transaksi dikelompokkan sesuai nama kelompok akun. Yang terakhir ialah menerbitkan laporan dengan catatannya yang dalam satu periode akuntansi bertransaksi serta dicatat didalam buku besar lalu dibuatlah laporan keuangan dan kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reabilitasnya yang sudah terjadi pada laporan keuangan.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas adalah konsep filosofis sentral dari manajemen sektor publik. Istilah akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah mengacu pada penyediaan dan pengungkapan informasi tentang kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus menjadi subyek informasi terkait dengan pelaksanaan hak publik (Paranoan *et, al.*, 2022).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas terdiri dari dimensi yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum mengacu pada kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diwajibkan dalam organisasi, sedangkan tanggung jawab integritas mengacu pada pencegahan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin kepatuhan terhadap aturan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur menjamin praktik organisasi yang baik.

Akuntabilitas yang jujur mengacu pada pencegahan penyalahgunaan jabatan, sedangkan tanggung jawab hukum mengacu pada memastikan kepatuhan terhadap hukum.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas kepemimpinan, yang juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja, merupakan tanggung jawab atas pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berarti bahwa acara-acara organisasi hendaknya adalah acara yang bermutu & mendukung taktik pada pencapaian visi, misi & tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan acara yg sudah dibentuk hingga dalam aplikasi acara. Akuntabilitas program terkait menggunakan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan bisa dicapai atau tidak. Alternatif acara yg menaruh output yang aporisma menggunakan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga publik harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan yang dirancang dengan mengevaluasi dampaknya di masa mendatang. Saat membuat kebijakan, Anda perlu mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan tersebut diterapkan. Akuntabilitas politik mengacu pada tanggung jawab pemerintah atas kebijakan yang diterapkan.

5. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas financial ini merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public fund*) secara ekonomis, efisien dan efektif tanpa pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Tanggung jawab keuangan sangat penting karena merupakan fokus utama masyarakat. Tanggung jawab ini menuntut lembaga publik untuk menyiapkan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Adapun aspek-aspek yang harus dipahami yang berkaitan dengan akuntabilitas (Rusdiana & Nasiruddin, 2018), sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah / seperti yang dijelaskan oleh akuntan British Columbia, "yaitu kesepakatan antara dua pihak".

2. Akuntabilitas berorientasi hasil

Dalam struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini, akuntabilitas tidak melihat input atau output, tetapi hasil.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung akuntabilitas, Tanggung jawab tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam pembahasan tanggung jawab dan definisi tanggung jawab adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti tugas dan komitmen memiliki konsekuensi.

4. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan menemukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipakai agar tersedianya laporan posisi keuangan, kinerja keuangan dengan terlihat posisi sebuah perusahaan/instansi yang relevan terkait laporan keuangan dengan sejumlah transaksi pelaporan selama satu periode dalam pelaporannya. Laporan keuangan dibuat seperti standar akuntansi yang ditetapkan umum agar laporan keuangan bisa disajikan dengan informasi yang berguna dalam menilai akuntabilitas serta membuat sebuah ketetapan ekonomi, sosial maupun politik.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai tolak ukur perspektif didalamnya wajib ada informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Terdapat empat jenis yang menjadi syarat perspektif laporan keuangan pemerintah untuk mencapai kualitas yang diinginkan diantaranya:

1. Relevan

Laporan keuangan yang relevan bila informasi didalamnya terkandung laporan keuangan berguna untuk pengevaluasian kejadian masa lalu pada saat ini, memprediksi masa yang akan datang dan bisa memengaruhi pengambilan keputusan dengan mengkonfirmasi atau melakukan pengecekan terhadap hasil evaluasi masa yang sudah berlalu, akibatnya laporan keuangan tersebut dikatakan relevan. Dengan cara ini, informasi akhir yang relevan boleh dikaitkan bersama tujuan penggunaan.

Informasi yang relevan terkait dengan pernyataan diantaranya:

- a. Memiliki manfaat umpan balik

Dengan informasi nilai umpan balik memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi atau mengoreksi pernyataan dimasa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediksi

Informasi punya nilai prediktif informasi yang membantu pengguna memprediksi masa depan didasari hasil masa yang sudah berlalu dan peristiwa saat ini.

- c. Tepat waktu

Informasi disediakan dalam waktu yang sesuai untuk memengaruhi serta membantu pada pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disediakan lengkap, termasuk seluruh informasi akuntansi mempunyai pengaruh dalam ketetapan bersama, mengingat keterbatasan yang ada. Informasi bisa dilatarbelakangi dalam setiap item material pada laporan keuangan dituangkan secara detail untuk menghindari kesalahan pada pengguna informasi tersebut.

2. Andal

Informasi pada laporan keuangan bebas dari pengetahuan yang bisa menyesatkan atau permasalahan material, menyediakan setiap fakta dengan benar dan transparan dalam segala hal, dan bisa diverifikasi. Informasi mungkin bisa disebut relevan, namun pengguna informasi tersebut bisa menyesatkan bila sifat atau representasinya tidak bisa diandalkan. Adapun karakteristik informasi yang andal diantaranya::

- a. Penyajian Jujur
- b. Dapat Diverifikasi
- c. Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Ketika dikorelasikan dengan laporan keuangan dari periode lalu atau dengan laporan keuangan umum perusahaan pelapor lainnya, informasi yang disertakan pada laporan keuangan menjadi sangat membantu. Anda mungkin membandingkan diri dengan hal-hal di dalam atau di luar. Perbandingan internal bisa dilakukan bila perusahaan memakai kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Untuk membuat perbandingan eksternal yang valid, bisnis wajib memakai standar akuntansi yang sama

dengan rekan mereka. Periode akuntansi di mana peningkatan bisa dinyatakan yakni waktu di mana agensi mengadopsi praktik yang lebih baik.

4. Dapat dipahami

Informasi yang tersaji di laporan keuangan disajikan pada format dan istilah yang mudah dimengerti bagi pengguna yang disesuaikan pada batas pemahamannya. Dengan demikian, pengguna diharapkan punya pemahaman yang wajar tentang aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor dan kesediaan mereka untuk menindaklanjuti informasi yang relevan.

2.2 Tinjauan Empiris

1. Penelitian Setyanto dan Ritchi (2018) dalam penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah" menghasilkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan meningkatkan kompetensi perangkat pengelolaan keuangan dengan menambah jumlah pegawai yang berlatar belakang akuntansi dan mengikuti pelatihan atau pengembangan profesi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi sehingga memahami semua proses keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
2. Penelitian Fathurrahman dan Suwarno (2019) dalam judul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Akuntansi

Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM, penerapan SAP memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi akuntansi tidak memengaruhi kualitas informasi akuntansi pemerintah daerah.

3. Penelitian Pavitasari dan Aisyah (2019) dalam judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Penelitian ini menghasilkan bahwa sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan tetapi standar akuntansi tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Penelitian Nasution (2019) dalam penelitian “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI (X1) dan pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI dan pengawasan kualitas laporan keuangan meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Penelitian Mulyanto *et.al.* (2020) dalam penelitian “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKD, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Untuk sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh SAKD, pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, tetapi sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6. Penelitian Redjo, (2020) pada penelitian “Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD Kabupaten TTU.” Menurut penelitian ini, kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh kompetensi SDM, hal ini berarti semakin tinggi kompetensi SDM maka semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, tetapi tidak terdapat pengaruh kompetensi SDM kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh pengendalian internal pada kabupaten TTU.
7. Penelitian Indrayani dan Widiastuti (2020) penelitian “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi

Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas daerah laporan keuangan pemerintah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

8. Penelitian Riska (2020) dalam penelitian “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Aceh”. Hasil penelitian yang dihasilkan bahwa Secara parsial bahwa komitmen organisasi dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan transparansi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Secara simultan komitmen organisasi, kompetensi aparatur, transparansi, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9. Penelitian Utama (2021) penelitian “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar”. Hasil penelitian terlihat penerapan SAP memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar, yang maksudnya kualitas laporan keuangan yang disajikan bisa memberi informasi keuangan yang relevan dan transparan tergantung seberapa baik SAP diterapkan.

10. Penelitian Husna *et,al.* (2022) penelitian “Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh.” Hasil penelitian bahwa kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan memengaruhi kualitas laporan keuangan Kabupaten Banda Aceh.